

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang saat ini sedang gencar melakukan program pembangunan dalam berbagai bidang. Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi yang lain, yang dipandang lebih. Sedangkan tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui berbagai aspek kehidupan.¹

Dalam pembangunan sangat dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat adalah elemen terpenting dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berpengaruh guna mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan individu dalam suatu tindakan. Menurut Bornby, partisipasi adalah suatu tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud untuk memperoleh manfaat. Menurut Verhagen, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.² Sedangkan menurut Wazir, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.

b. Prinsip-prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Panduan Pelaksanaan

¹Siti Hajar, dkk., *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, (Medan: Aqli, 2018), 6-9

² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 81

Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department For International Development (DFID) adalah:³

- 1) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proyek pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan. Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- 3) Transparansi. Semua pihak harus dapat memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- 4) Kesetaraan kewenangan. Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- 5) Kesetaraan tanggung jawab. Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- 6) Pemberdayaan. Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- 7) Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.⁴

Sedangkan untuk pengertian masyarakat, masyarakat berdasarkan dari akar katanya berasal dari

³Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, 30

⁴Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, 31

bahasa Arab yaitu “*musyarak*”. Adapun jika di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *society* yang berasal dari bahasa latin “*societas*” yang artinya adalah hubungan persahabatan dengan yang lain. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat yaitu sekelompok manusia yang membentuk sebuah sistem, baik secara semi terbuka maupun tertutup dan diantara anggotanya terjadi interaksi sehingga menimbulkan ketergantungan antara satu dengan yang lain.⁵

Menurut Selo Soemardjan, mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dan Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu.

Adapun Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

- 1) Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu
- 2) Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama
- 3) Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan
- 4) Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan yang lain.⁶

Masyarakat terdiri atas sekumpulan manusia yang hidup secara teratur. Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma yang berfungsi mengatur sekelompok manusia di dalamnya. Norma dibedakan atas norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis yaitu norma yang aturannya telah ditetapkan dan

⁵ Indriana F, *Mengenal Masyarakat Indonesia*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 6

⁶Bambang Tejkusumo, “Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial”, *Jurnal Geoedukasi* 3 No.1 Maret (2014), 39

disahkan dengan undang-undang. Sedangkan norma tidak tertulis yaitu norma yang menyangkut baik dan baiknya didalam masyarakat dan sudah menjadi pedoman umum bagi sekelompok orang tersebut.⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan atau dalam suatu program dimana seseorang atau suatu kelompok mengambil peranan dalam kegiatan tersebut. Menurut Adisasmita menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu pemberdayaan masyarakat dengan peran serta kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan atau kemampuan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam terhadap suatu kegiatan.⁸

Conyers mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang penting dalam partisipasi masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya suatu program serta suatu proyek akan gagal.
- Masyarakat akan lebih mempercayai suatu proyek atau program jika merasa dilibatkan langsung dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk suatu program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
- Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan langsung dalam suatu program.⁹

Sedangkan Yadav dalam hal ini mengemukakan bahwa terdapat empat macam kegiatan yang

⁷ Indriana F, *Mengenal Masyarakat Indonesia*, 6-7

⁸SeptioferaEresusPrabowo, Djamhur Hamid, ArikPrasetya, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (StudiKasusDesaPujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)", *JurnalAdministrasi Bisnis*33 No.2 April (2016): 20

⁹Siti Hajar, dkk,*Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*,32

menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diantaranya yaitu:

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.¹⁰

2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi dari masyarakat banyak untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang diatasnya dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Disamping itu, yang sering dilupakan dalam pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam

¹⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 82-83

¹¹Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*,33

pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati dalam jangka panjang.¹²

- 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan yang sangat diperlukan.¹³

- 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Sayangnya partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya pasti akan

¹² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 83

¹³ Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, 33

dapat dirasakan oleh masyarakat sarasannya. Padahal, seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.¹⁴

Sedangkan jika ingin melibatkan masyarakat atau ingin masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangun, berarti juga memberdayakan masyarakat. Disebut sebagai memberdayakan masyarakat, karena dengan melibatkan masyarakat dalam suatu pembangunan, maka akan pula merubah pola pikir dan memandirikan masyarakat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kata pemberdayaan sendiri berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemauan untuk bertindak, sedangkan pemberdayaan berasal dari kata “pem-ber-daya-an” yang berarti suatu proses, cara atau perbuatan memberdayakan.¹⁵

Pemberdayaan masyarakat bisa dipahami atau diartikan sebagai proses mengembangkan, menswadayakan, memandirikan dan memperkuat posisi masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan penekanan disegala bidang dan sektor yang merubah kehidupan agar lebih sejahtera. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan dan proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.¹⁶

Menurut Jim Ife, pemberdayaan adalah penyediaan sumber daya, kesempatan,

¹⁴Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 84

¹⁵KBBI Online, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, <https://kbbi.web.id/daya>.

¹⁶Dedy Wahyu Hernanda, “pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Wisata Syari’ah (Halal Tourism) di Pulau Santen Banyuwangi” e-ISSN 2598-1064, 27.

pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kepastian masyarakat, sehingga masyarakat bisa menemukan masa depan yang lebih baik¹⁷ Sedangkan menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko, menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.¹⁸

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat tergantung atas pilihan dalam bidang kesejahteraan sosial yang diharapkan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan juga bidang pendidikan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bertujuan agar masyarakat yang diberdayakan menyadari potensi, kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri sendiri guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.¹⁹ Terdapat beberapa langkah-langkah dalam pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat dan pemerintah. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah:

- a. Memberikan penyadaran kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh masyarakat yang perlu diberdayakan.

¹⁷ Mubasyaroh, "Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.1 No.1 (2016): 60.

¹⁸Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 100

¹⁹Mubasyaroh, "Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.1 No.1 (2016): 60-61.

- b. Memberikan motivasi kepada masyarakat yang perlu diberdayakan.
- c. Mengembangkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan keterampilan.
- d. Menciptakan peluang usaha mandiri untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dalam penyaluran produksi.²⁰

c. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Kemudian Dusseldorp mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:²¹

- Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- Menggerakkan sumber daya masyarakat.
- Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.²²

d. Tipe-tipe Partisipasi Masyarakat

Sedangkan Habley mengidentifikasi terdapat tujuh tipe dalam partisipasi, diantaranya adalah:

- 1) Partisipasi Pasif/Manipulatif, yang memiliki karakteristik diantaranya:
 - Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi.
 - Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat.
 - Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

²⁰Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembang Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes" *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol.7 No.3 (2018): 300.

²¹Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, 34

²²Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 84

- 2) Partisipasi Informatif, yang memiliki karakteristik diantaranya:
 - masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian,
 - Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian,
 - Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.²³
- 3) Partisipasi Konsultatif, yang memiliki karakteristik diantaranya:
 - Masyarakat berpartisipasi dengan cara konsultasi,
 - Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya.
 - Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama.
 - Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan.
 - Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
- 4) Partisipasi Insentif, yang memiliki karakteristik diantaranya:
 - Masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/upah.
 - Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan.
 - Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.²⁴
- 5) Partisipasi Fungsional, yang memiliki karakteristik diantaranya:
 - Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek.

²³Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 88-89

²⁴Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, 34-35

- Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati.
 - Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
- 6) Partisipasi Interaktif, yang memiliki karakteristik diantaranya:
- Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan.
 - Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis.
 - Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.²⁵
- 7) Self Mobilization (Mandiri), yang memiliki karakteristik diantaranya:
- Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki.
 - Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan.
 - Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan dan evaluasi. Muluk menjelaskan bahwa, partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penerima manfaat pembangunan dengan

²⁵Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 89-90

mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat ini, maka akan menjadikan masyarakat dan pemerintah yang merupakan mitra kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁶

e. Dampak Dari Partisipasi Masyarakat

Menurut Abe, melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak, yaitu:

- Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat.
- Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.
- Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.²⁷

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tentu saja tidak mudah. Dalam hal ini Slamet menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam suatu program, timbulnya partisipasi masyarakat merupakan suatu perilaku masyarakat untuk melakukan suatu tindakan, dimana terdapat tiga faktor utama yang mendukung partisipasi masyarakat, diantaranya:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.²⁸

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan merupakan hal yang sangat penting. Karena masyarakat bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan, melainkan masyarakat juga

²⁶Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*,35

²⁷Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*,35-36

²⁸ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 92

berperan sebagai subyek. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah.

2. Pengertian Desa Wisata

Potensi wisata yang luar biasa yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa menjadi andalan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Sektor pariwisata bisa menjadi sektor penopang pemasukan negara dibidang non migras. Di era yang semakin maju semakin pula banyak cara dan strategi untuk mengangkat potensi wisata disuatu daerah. Desa memiliki segudang potensi bisnis yang menguntungkan untuk bisa diangkat menjadi komoditas dan diubah dengan manajemen strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata.²⁹

Sejak dahulu kala, desa memiliki potensi yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Salah satunya adalah lokasi tamasya yang kerap menyajikan eksotisme surgawi yang menyedot banyak atensi. Ada kecenderungan bahwa ketimbang menghabiskan waktu mengunjungi pusat keramaian dikantong urban, para wisatawan lebih berminat menjadikan kawasan pedesaan sebagai destinasi wisata. Setiap desa menjanjikan keunggulan masing-masing berdasarkan letak geografis, konstruksi tanah, tipologi sosial, serta karakteristik dari masyarakatnya.³⁰

Menurut Bintarto desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Kartohadikusumo desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintah terendah dibawah camat. Desa memiliki beberapa unsur, diantaranya:

- Unsur daerah, berupa tanah produktif dan tidak produktif serta unsur lokasi, luas, dan batas.

²⁹Zwenli Pramono, *Membangun Desa Wisata Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Rubrik, 2019), 25

³⁰Artika Dwi Istiyani, *Menggali Potensi Desa Wisata*, (Purbalingga: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 21-22

- Unsur penduduk berupa jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk.
- Unsur tata kehidupan berupa seluk beluk masyarakat desa.

Sedangkan menurut Rahardjo Adisasmito, terdapat beberapa ruang lingkup pengembangan pedesaan, yaitu:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman dan lainnya).
- 2) Pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- 4) Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan miskin).
- 5) Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan.³¹

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, memwadahi peran, dan partisipasi masyarakat. Selain itu meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat, keikutsertaan dalam menyukseskan pembangunan kepariwisataan.³² Definisi desa wisata berdasarkan pendapat para tokoh, diantaranya:

- 1) Menurut Wiendu, desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata

³¹ Anityas Dian Susanti, "Pola Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang", ISSN 0853-2877, *Jurnal Modul* 15 No.1 Januari-Juni (2015): 49

³² Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata*, (Sukoharjo: Graha Printama Selaras, 2018), 48

biasanya memiliki kecenderungan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata

- 2) Menurut Edward Inskeep, memberikan definisi desa wisata sebagai wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat
- 3) Pariwisata Inti Rakyat, mendefinisikan desa wisata sebagai suatu kawasan pedesaan yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.³³

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta mampu menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.³⁴

Potensi desa berupa potensi wisata juga menjadi potensi jangka panjang yang mana dalam

³³ Zwenli Pramono, *Membangun Desa Wisata Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan*, 5-7

³⁴ T. Prasetyo Hadi Atmoko, "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman", *Jurnal Media Wisata* 12, No.2 November (2014), 147

pengembangannya harus sangat berhati-hati sehingga tidak merusak potensi yang ada. Tanpa adanya campur tangan pemerintah dan kesadaran dari masyarakat desa, potensi wisata ini akan mati dan tidak dapat dikembangkan. Dengan potensi desa yang mampu untuk dikenali, dengan begitu mampu untuk dilakukan manajemen didalamnya serta mampu diajak untuk berpartisipasi didalamnya.³⁵

a. Komponen Utama Desa Wisata

Membentuk desa wisata ini membutuhkan konsep-konsep yang harus dipenuhi, terdapat dua konsep utama dalam komponen desa wisata yaitu:

1) Akomodasi

Sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan unit-unit berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.³⁶

2) Atraksi

Seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif seperti kursus tari, bahasa, dan lain-lain yang spesifik.³⁷

b. Faktor Pendukung Desa Wisata

Suatu desa dapat dikatakan sebagai desa wisata apabila memunihi beberapa faktor, diantaranya:

1) Faktor kelangkaan

Faktor ini meliputi sifat dari atraksi wisata yang tidak bisa dijumpai atau langka ditempat lain

2) Faktor alamiah

Faktor ini meliputi sifat atraksi wisata yang belum pernah mengalami perubahan akibat campur tangan manusia³⁸

³⁵Zwenli Pramono, *Membangun Desa Wisata Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan*, 23-24

³⁶Artika Dwi Istiyani, *Menggal Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, 11

³⁷Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata*, 49

³⁸Artika Dwi Istiyani, *Menggal Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, 9

3) Faktor keunikan

Faktor ini meliputi sifat atraksi wisata yang memiliki keunggulan komperatif dibanding obyek wisata yang lainnya

4) Faktor pemberdayaan

Faktor ini meliputi pemberdayaan yang mampu menghimbau masyarakat agar ikut serta dan diberdayakan dalam pengelolaan obyek wisata di daerahnya.³⁹

c. Tujuan Pembangunan Desa Wisata

Tujuan dari pembentukan desa wisata, yaitu untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan. Selain itu, dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.⁴⁰

Adapun untuk membangun dan menumbuhkan sikap serta dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu daerah. Adapun manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.⁴¹

d. Fungsi Desa Wisata

Fungsi desa wisata sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi wisata dan terciptanya Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata. Hal tersebut sebagai unsur kemitran baik bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan kepariwisataan di daerah.⁴²

³⁹Zwenli Pramono, *Membangun Desa Wisata Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan*, 11

⁴⁰Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata*, 49-50

⁴¹Artika Dwi Istiyani, *Mengali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, 16

⁴²Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata*, 50

Pengembangan sebuah desa yang memiliki potensi wisata baik dari bentang alamnya, produk lokalnya maupun keunikan adat dan budaya didalamnya tentu saja salah satunya didasarkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi.⁴³

Sedangkan adanya pembangunan desa wisata akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

- 1) Bidang ekonomi: meningkatkan perekonomian nasional, regional dan masyarakat lokal.
- 2) Bidang sosial: membuka lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat desa.
- 3) Bidang politik, internasional: menjembatani perdamaian antar bangsa didunia, sedangkan untuk nasional: dapat memperkokoh persatuan bangsa, mengatasi disintegrasi.
- 4) Bidang pendidikan: memperluas wawasan dan cara cara berpikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan sehat.
- 5) Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek): meningkatkan ilmu dan teknologi di bidang kepariwisataan.
- 6) Bidang sosial dan budaya: menggali dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang hampir punah untuk dilestarikan kembali.
- 7) Bidang lingkungan: menggugah sadar lingkungan, yaitu menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan masa yang akan datang.⁴⁴

e. Syarat dan Tipe Desa Wisata

Suatu desa dapat dikatakan sebagai desa wisata jika desa tersebut dapat memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

⁴³ Artika Dwi Istiyani, *Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, 16

⁴⁴Erвина Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata*, 51

- 1) Aksesibilitas yang baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai sarana transportasi
- 2) Memiliki obyek-obyek yang menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan khas, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai atraksi wisata
- 3) Masyarakat dan aparat desa menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata dan para wisatawan yang datang ke desa
- 4) Keamanan di desa tersebut terjamin
- 5) Tersedia akomodasi, telekomunikasi dan tenaga kerja yang memadai
- 6) Beriklim sejuk dan dingin
- 7) Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat.⁴⁵

Menurut pola, proses, dan tipe pengelola desa atau kampung wisata di Indonesia terbagi dalam dua bentuk, yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka. Berikut ini penjelasannya

- 1) Tipe terstruktur

Tipe terstruktur ditandai dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya, sehingga mampu menembus pasar internasional
- b) Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. Selain itu, pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini
- c) Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinasi.⁴⁶

⁴⁵Artika Dwi Istiyani, *Menggal Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, 9-10

2) Tipe terbuka

Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh dan menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal. Akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan.⁴⁷

f. Langkah-langkah Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Desa Wisata

Untuk mencapai desa wisata yang baik, sangat diperlukan masyarakat yang sadar akan potensi daerahnya pula. Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mampu untuk mandiri dan menumbuhkan kreatifitas. Beberapa langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, diantaranya:

1) Penyuluhan

Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang desa wisata perlu dengan memberikan penyuluhan tentang bagaimana mengelola desa wisat, pemanfaatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta mengelola lingkungan hidupnya. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebelum membina, penyuluh lapangan disini perlu melakukan pendekatan dengan memahami kemampuan kelompok maupun perorangan agar materi yang disampaikan kepada warga desa dapat dicerna dengan baik. Dalam hal ini, peran seorang penyuluh dalam memberikan

⁴⁶Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata*,50

⁴⁷Zwenli Pramono, *Membangun Desa Wisata Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan*,8

penyuluhan kepada masyarakat memiliki tiga peranan, yaitu:

- Berperan sebagai pendidik, memberikan pengetahuan atau cara-cara baru dalam mengelola desa wisata.
- Berperan sebagai pemimpin, yang dapat membimbing dan memotivasi masyarakat agar mau mengubah cara berpikirnya, dan agar lebih terbuka lagi.
- Berperan sebagai penasihat, yang dapat melayani, memberikan petunjuk dan membantu masyarakat dalam mengelola desa wisata.⁴⁸

2) Pelatihan

Setelah melakukan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang desa wisata, maka tahap selanjutnya adalah dengan melakukan pelatihan. Pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dilakukan. Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan khusus yang lebih spesifik. Agar pelatihan menjadi lebih efektif maka didalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang didalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi. Ini berarti bahwa pelatihan adalah suatu pengalaman pembelajaran didalam mencari perubahan permanen secara relatif pada suatu individu yang akan memperbaiki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya.⁴⁹ Beberapa

⁴⁸Artika Dwi Istiyani, *Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, 43

⁴⁹Artika Dwi Istiyani, *Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, 44

manfaat dengan adanya pelatihan diantaranya adalah:

- Meningkatkan pengetahuan para warga atas budaya dan para pesaing luar.
- Membantu para warga yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi baru.
- Membantu para warga untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas.
- Memastikan warga menekankan pada inovasi, kreativitas dan pembelajaran.⁵⁰

g. Dampak Positif dan Negatif Adanya Desa Wisata

• **Dampak Positif**

- 1) Adanya keuntungan secara ekonomi melalui transaksi yang terjadi

Dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata selanjutnya adalah meningkatnya penjualan produk lokal sehingga meningkatkan perekonomian warga desa. Salah satunya yang nyata dari dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata adalah desa wisata yang dimanfaatkan sebagai salah satu cara promosi produk-produk lokal yang ada didalam desa. Manfaat promosi ini juga akan meningkatkan status desa sebagai desa wisata akan memberikan manfaat timbal balik.⁵¹

- 2) Berpotensi memunculkan adanya ide usaha baru di sekitar kawasan

Sebuah desa akan bisa berkembang dengan pesat ketika semua elemen masyarakatnya terutama para generasi

⁵⁰Artika Dwi Istiyani, *Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*,45

⁵¹ Artika Dwi Istiyani, *Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, 17-18

mudanya mampu berpikir kreatif untuk membuat karya-karya yang menarik. Terlebih lagi, berbagai potensi yang ada di desa sebenarnya sangat memungkinkan untuk bisa dikembangkan dan bisa diwujudkan kegiatan berbasis usaha ekonomi masyarakat manakala dikemas dengan cara yang kreatif dan inovatif. Begitupun juga dengan potensi keindahan yang dimiliki alam di pedesaan. Jika dikemas secara kreatif dan inovatif maka besar peluangnya akan menjadi lahan uang bagi masyarakat desa tersebut.

- 3) Secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang rapih dan bersih.

Selanjutnya untuk dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata yang dapat dirasakan atau bahkan diutamakan adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dirasa penting baik bagi sebuah desa wisata agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengunjung ataupun bagi masyarakat desa. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa sebagai dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata, selain untuk kepentingan wisata juga baik adanya apabila digunakan untuk kepentingan masyarakat desa juga.⁵²

- 4) Menciptakan lowongan pekerjaan

Dampak positif pengembangan desa wisata yang pertama adalah tersedianya lapangan pekerjaan baru yang ada di desa. Apabila sebelumnya warga desa hanya mengandalkan hasil pertanian ataupun peternakan, dengan adanya pengembangan desa wisata ini diharapkan mampu menyerap

⁵² Artika Dwi Istiyani, *Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, 18-20

tenaga kerja lokal yang sudah ada. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang baik dan berkualitas untuk memajukan pengembangan desa wisata.

- **Dampak Negatif**

- 1) Adanya pencemaran lingkungan

Banyaknya pengunjung yang berdatangan ke wilayah wisata jika berlebihan dan tidak terkontrol dapat berakibat lingkungan menjadi rusak. Tangan-tangan jahil pengunjung kadang suka dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak fasilitas maupun alam pada wilayah wisata. Salah satu contoh paling sederhana masih banyak kebiasaan pengunjung yang membuang sampah disembarang tempat. Hal ini dapat berakibat merusak wisata yang ada

- 2) Dampak pembangunan pariwisata terhadap lingkungan hidup

Industri pariwisata memiliki hubungan erat dan kuat dengan lingkungan fisik. Lingkungan alam merupakan aset penting dari pariwisata. Hubungan lingkungan dan pariwisata tidak selamanya saling mendukung dan menguntungkan. Maka dari itu, upaya konservasi, apresiasi, dan pendidikan dilakukan agar hubungan antara pembangunan pariwisata dan lingkungan dapat berkelanjutan.

- 3) Rusaknya kondisi alam

Beberapa kerusakan kondisi alam yang disebabkan karena adanya pembangunan desa wisata diantaranya adalah:

- Kerusakan air
- Kerusakan atmosfer
- Kerusakan vegetasi
- Rusaknya kehidupan satwa liar

- Rusaknya pantai dan pulau⁵³

3. Tata Cara Pengembangan Desa Wisata

Eksistensi desa wisata yang ada sekarang ini muncul dan berkembang berdasarkan kegiatan turun temurun yang menjadi unggulan di suatu desa.

a. Kriteria Pengembangan Desa Wisata

Adapun kriteria pengembangan desa wisata adalah adanya 4A dan C1, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki *attraction*/atraksi wisata unggulan
- 2) Memiliki *amenities*/kelembagaan
- 3) Memiliki *aksesibilitas*/sarana-prasarana yang memadai
- 4) Memiliki *ancilliries*/akomodasi wisata pendukung
- 5) Memiliki *community involvement*/keterlibatan masyarakat⁵⁴

b. Langkah-langkah Pengembangan Desa Wisata

Guna dapat mengetahui dan menggali potensi desa diperlukan langkah atau cara agar dapat secara mudah dan jelas apa potensi dan metode pengembangannya.

- 1) Cara mengetahui potensi yaitu dengan 3P
 - a) Posisi. Posisi bermaksud mengetahui letak dan geografi desa
 - b) Potensi. Potensi merupakan keadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
 - c) Prestasi. Prestasi merupakan capaian serta kemajuan masyarakat dan memiliki prestasi tingkat kabupaten/kecamatan.
- 2) Membentuk lembaga ditingkat desa
 - a) Lembaga POKDARWIS (kelompok sadar wisata)
 - b) Lembaga pengelola wisata

⁵³Artika Dwi Istiyani, *Menggali Potensi Desa Wisata Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata*, 20-28

⁵⁴ Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata*, 63

3) Prinsip utama desa wisata

Ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan desa wisata, diantaranya sebagai berikut:

- a) Kendalikan kepemilikan lahan dengan kontrol tetap di desa
- b) Tumbuhkan jiwa bersaing sehat
- c) Setia pada proses awal pengembangan desa wisata dan jangan beranggapan bahwa desa wisata dapat berjalan secara instan
- d) Hendaklah bergerak secara bersama antara dinas dan adat
- e) Tetap seperti semula dan jangan berubah karena menjadi desa wisata serta yang terpenting dengan selalu menjaga kahuripan Bali⁵⁵

4) Strategi pengembangan

- a) Inventarisasi. Inventarisasi merupakan pendataan melalui angket atau wawancara tentang monografi desa
- b) Pemetaan. Pemetaan diperoleh berdasarkan data kita saat melakukan pengamatan
- c) Plan/program. Plan/program merupakan kegiatan menyusun program untuk pengembangan desa wisata. Plan/program terdiri atas hal-hal sebagai berikut:
 1. Program yang akan dilaksanakan
 2. Jadwal pelaksanaan
- d) Action/pelaksanaan
Action/pelaksanaan merupakan kegiatan melakukan program sesuai jadwal
- e) Evaluation
Evaluation merupakan tindakan mengevaluasi apa yang telah dilakukan
- f) Tindak lanjut
Tindak lanjut merupakan kegiatan lanjutan setelah dievaluasi apa saja yang belum dilaksanakan

⁵⁵ Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata*, 63-71

g) Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas sebagai berikut:

- ❖ Membuat dokumen administrasi
- ❖ Membuat dokumen foto/CD

c. Contoh-contoh Desa Wisata Yang Ada Di Indonesia

1) Desa Wisata Watu Cenik, Wonogiri

Objek wisata panorama Watu Cenik adalah salah satu objek wisata yang menyuguhkan keindahan pemandangan perbukitan seribu dengan Waduk Gajah Mungkur dari ketinggian sebuah bukit. Wisata watu cenik ini resmi dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sendang sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan menggunakan biaya retribusi masuk dan juga parkir. Selain watu cenik, terdapat dua objek wisata yang ada di Desa Sendang, yakni Puncak Joglo dan Menara Pandang Soko Gunung.⁵⁶

2) Desa Wisata Ponggok, Polanharjo, Klaten

Umbul Ponggok merupakan sebuah kolam alami yang dikembangkan menjadi wisata snorkling yang cukup terkenal di Klaten. Desa wisata yang dikelola oleh BUMDesa Tirta Mandiri ini telah berhasil membangun perekonomian di desa tersebut. Terdapat beberapa objek wisata yang menjadi andalan, diantaranya: Toko Desa, Ponggok Ciblon, dan budi daya peikanan. Dengan adanya beberapa objek wisata tersebut, Desa Ponggok dapat mempunyai pendapatan lebih dari Rp.100 juta setiap tahunnya.

3) Desa Wisata Bleberan, Playen, Gunung Kidul

Desa Wisata Bleberan memiliki objek wisata unggulan yaitu Sri Gethuk. Desa ini berada di Kecamatan Playen, Gunung Kidul. Desa wisata Bleberan sebenarnya adalah desa wisata alam dengan air terjun Sri Gethuk sebagai ikonnya. Pengelolaan wisatanya dikelola dalam manajemen BUMDes. Ini sudah ada sejak tahun 2007 saat

⁵⁶Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata*, 56-67

yang lain belum mengenal BUMDes. Keberhasilan model pengelolaan pariwisata melalui BUMDes ini lantas menjadi model bagi daerah yang lain.⁵⁷

B. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan untuk menyusun konsep-konsep pada penelitian sebagai berikut:

- 1) Penelitian dari Septiofera Eresus Prabowo, Djahmur Hamid, dan Arik Prasetya (2016) yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih sangat kurang. Masih sangat perlu adanya sosialisasi, dan berbagai pelatihan terkait sumber daya manusia. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata meliputi partisipasi buah pikir, partisipasi tenaga fisik, partisipasi keterampilan dan kemahiran, serta partisipasi harta benda. Selain itu, terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.⁵⁸Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Untuk perbedaannya dengan penelitian yang peneliti akan lakukan terletak pada sudut pandangnya, sudut pandang penelitian ini terletak pada pemerintah desa, sedangkan sudut pandang yang peneliti lakukan terletak pada pengelola wisatadan masyarakat.
- 2) Penelitian dari Eko Murdiyanto yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan

⁵⁷Ervina Desi Prapita, *Pengembangan Desa Wisata*, 54-56

⁵⁸SeptioferaEresusPrabowo, Djahmur Hamid, ArikPrasetya, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)",*Jurnal Administrasi Bisnis*33 No.2 April (2016): 18

melakukan survei. Penelitian tersebut menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata ini masyarakat belum berjalan dengan baik, karena masyarakat masih malu-malu untuk ikut berpartisipasi. Dalam hal ini partisipasi masyarakat terdapat dalam tiga dimensi, yaitu dari dimensi pemikiran, dimensi tenaga, dan dimensi materi.⁵⁹ Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Untuk perbedaannya terletak pada sudut pandangnya, sudut pandang penelitian ini terletak pada pemuda karang taruna, sedangkan dalam penelitian sudut pandang yang peneliti lakukan terletak pada pengelola wisata dan masyarakat.

- 3) Penelitian dari Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, dan M. Baiquni yang berjudul Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi non partisipan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih belum terwujud. Masyarakat belum menjadi subyek pembangunan tetapi masih menjadi objek pembangunan. Selain itu, peran pemerintah dalam hal ini juga masih sangat dibutuhkan.⁶⁰ Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penelitian lakukan yaitu menjelaskan tentang partisipasi masyarakat masyarakat dalam pengembangn desa wisata. Untuk perbedaannya terletak pada sudut pandangnya, sudut pandang penelitian ini terletak pada pemerintah desa, sedangkan sudut pandang yang peneliti lakukan terletak pada pengelola wisata dan masyarakat.

⁵⁹Eko Murdiyanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman", ISSN: 1829-9946, *Jurnal Sepa* 7 No.2, Februari (2011): 100

⁶⁰ Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, M. Baiquni, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali", *Jurnal Kawistara* 3 No. 2, Agustus (2013): 129

C. Kerangka Berfikir

Pembangunan merupakan aspek terpenting bagi suatu negara guna mensejahterakan masyarakat. Salah satu pembangunan yang saat ini sedang dijalankan di Indonesia adalah pembangunan yang berorientasi di sektor pariwisata. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sejuta keindahan alam. Beberapa wisata yang ada di Indonesia bahkan berhasil menarik perhatian oleh masyarakat mancanegara, seperti wisata Bali, Lombok, dan wisata yang ada di Jogja. Salah satu wisata yang saat ini sedang berkembang adalah desa wisata. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa. Dimana potensi tersebut kemudian dikembangkan menjadi hal yang menarik untuk memikat hati para wisatawan.

Pembangunan desa wisata ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen, diantaranya dari masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah desa. Dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah desa, dengan begitumaka pengembangan desa wisata akan berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan guna memperbaiki taraf kehidupan masyarakat. Dari ketiga elemen tersebut, yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata ini adalah masyarakat. Adanya keikutsertaan atau partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan karena bagaimanapun pengembangan desa wisata ini akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dapat dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya, partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu, masyarakat dilibatkan dalam segala aspek diantaranya yang mencakup ide, gagasan, dan buah pikir. Yang kedua yaitu partisipasi dalam pelaksanaan yang mencakup diantaranya berupa memberikan tenaga, memberikan dana untuk pembangunan. Yang ketiga yaitu partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yang mencakup diantaranya, masyarakat ikutserta dalam mengawasi dan memantau dalam pembangunan. Dan yang

terakhir adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan yang mencakup diantaranya, hasil pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat guna mensejahterakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik.

Dari uraian diatas, maka dapat diperoleh kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

